

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perbedaan peraturan dan pedoman mengenai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Perbedaan-perbedaan ini dapat mengakibatkan interpretasi dan penerapan undang-undang yang tidak konsisten, akses yang tidak setara terhadap peraturan dan pedoman yang relevan, bias dalam pengambilan keputusan, penilaian subjektif, dan tantangan dalam merekonsiliasi ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Sehingga perbedaan-perbedaan ini dapat berdampak pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum, yang pada nantinya dapat mempengaruhi keputusan suatu perkara. Hal ini dapat memberikan hasil yang berbeda untuk kasus yang serupa, bergantung pada peraturan atau pedoman yang diterapkan.

Adanya ketidakjelasan mengenai pengaturan pelanggaran HAM berat yang dalam penulisan ini khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan salah satu alasan terhambatnya penyelesaian peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Selain itu, pengadilan HAM yang ada pada saat ini hanya mengadili pelanggaran HAM berat setelah tahun 2000 atau setelah diundangkannya UU Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, terdapat dua cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku yaitu Pengadilan HAM *ad hoc* atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, kedua mekanisme ini juga menghadapi berbagai kendala.

5.2 Saran

Penting bagi para penegak hukum untuk menyadari perbedaan-perbedaan ini dan mengupayakan konsistensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional ketika mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, diperlukan

kerangka hukum komprehensif yang secara jelas mendefinisikan dan mengkriminalisasi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikarenakan Pengadilan HAM *ad hoc* dikatakan tidak efektif dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dapat menjadi usulan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Karena KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai KKR. Peraturan yang jelas dapat mendukung peran penting penegak hukum pada penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dan dapat memberikan perlindungan yang tepat bagi korban dan saksi seperti program rehabilitasi dan kompensasi yang efektif untuk memastikan pemulihan bagi mereka yang terdampak.

Daftar Pustaka

Buku

- Bassioni, M.C. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. The Hague: Kluwer Law, 1999.
- Eddyono, Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo. *Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Fadjar, A. Muktie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Jauhariah. *Dinamika Hukum & HAM*. Jakarta: Cintya Press, 2016.
- Kasim, Ihdhal. *Elemen-elemen Kejahatan Dari "Crimes Against Humanity": Sebuah Penjelajahan Pustaka*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Philip A., Frans M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rehman, Javaid. *International Human Rights Law*. Great Britain: Pearson Education Limited, 2003.
- Rhona K., et.al. *Hukum Hak Asasi MANusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Titik, Titik Triwulan. *Konstruksi hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 195=45*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahidin, Samsul. *Pokok-Pokok Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zainal A., Supriyadi W. *Degradasi Extraordinary Crimes; Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Report, 2017.

Jurnal

- al-Rahab, Amiruddin. "Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya." *Jurnal HAM (Vol. 12, No.12)*, 2016.
- Chrisbiantoro. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu." *E-Journal Universitas Bung Karno (Vol. 01, No. 02)*, 2022.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Politik (Vol. 14, No. 02)*, 2017.
- Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Jurnal Syiar Hukum (Vol. XIII, No. 1)*, 2011.
- Koto, Zulkarnain. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum ke Kelemahan Penerapan Hukum." *Jurnal Studi Kepolisian (Edisi 066)*, 2005.
- Kurniawan, Arief Rianto. "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum di Timor Pasca Jejak Pendapat." *Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 13, No. 02)*, 2013.
- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia." *UIR Law Review (Vol. 02, No. 02)*, 2018.
- Mulkan H., et.al. "Analisis Framing Rober Entman Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan di Media Asing." *Jurnal Ilmu Komunikasi (Vol. 7, No.1)*, 2023.
- Pakpahan, Zainal Abidin. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000." *Jurnal Ilmiah "Advokasi" (Vol. 05)*, 2017.
- Rares, Jootje Jafet. "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Jurnal UNSRAT (Vol. 01, No. 03)*, 2013.
- S., Laurensius Arliman. "Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum (Vol. 02, No. 01)*, 2017.

Syafi'ie, M. "Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* (Vol. 09, No. 04), 2012.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Jurnal Hukum Legal Standing* (Vol. 02, No. 02), 2018.

Yunara, A. Yulia. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Jurnal Al Dustur* (Vol. 02, No. 02), 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Statuta Roma 1998

Elements of Crimes

Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando

Internet

Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad.hoc/2002/PHJkt.Pst. (Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, n.d.).

Putusan No. 09/Pid.HAM/Ad.hoc/2002/PHJkt.Pst. (Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, n.d.).

Akademik, Naskah. *Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.*

- BBC News Indonesia. "Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM temukan 'pelanggaran pidana' - 'Harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya 135 orang')." 2022.
- Febrianto, Vicki. *Total Korban Tragedi Kanjuruhan 754 Orang*. Antara News, 2022.
- Hukumonline. "Tragedi Kanjuruhan Dinilai Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat." 2022.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Abilio Jose Osario Soares." 2011.
- Kontras. "Tragedi Tanjung Priok - 12 September 1984, <https://kontras.org/tanjung-priok-2/>." *Kontras*. n.d.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Indonesia Belum Ratifikasi Statuta Roma." 2023.
- P., Han Revanda. *Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi*. Nasional Tempo, 2024.
- Pengadilan HAM Ad.hoc Jakarta Pusat. "Putusan No. 02/Pid.HAM/Ad.hoc/2002/PN.Jkt.Pst." n.d.
- Permatasari, Erizka. *Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?* hukumonline, 2022.
- Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad.hoc/2002/PHJkt.Pst.* (Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, n.d.).
- Rachmawati. *Mengenang Tragedi Wasior Papua Tahun 2001*. Kompas, 2022.
- Yunus, Muhammad. *Pelanggaran HAM dituntaskan*. Makassar Terkini, 2019.